UNDP
Indonesia

INDONESIA
CPR UPDATE
Crisis Prevention and Recovery

BAHASA INDONESIA | JANUARI 2008

PROGRAM PEMBANGUNAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
mitra dalam pembangunan manusia

DAFTAR ISI

h.i Catatan dari Redaksi.

Artikel

h. 1 Kunjungan Bersama Monitoring Lapangan UNDP.
h. 2 Nias di Persimpangan Jalan.
h. 3 Nias Ya'ahowu!!!
h. 4 Kios yang Selamat Berkat Gempa.
h. 4 Warung Mak Andi.
h. 5 Program Pemulihan Sumber Penghidupan Pertanian.
h. 5 Rempah-rempah Menghalau Tanaman.
h. 5 Kegiatan Pencegahan Krisis dan Pemulihan di Nias.

Mengenai Pencegahan dan Pemulihan Krisis.

h. 6 Biro Pencegahanan Krisis dan Pemulihan.
h. 6 Unit Pencegahan Krisis dan Pemulihan UNDP Indonesia.
h. 7 Lima Ikhtiar Biro Pencegahan Krisis dan Pemulihan.
h. 8 Bidang Kerja Pencegahan Krisis dan Pemulihan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian kerja Tim Pencegahan Krisis dan Pemulihan UNDP Indonesia, mohon menghubungi kami di **info.cpru.id@undp.org** atau kunjungi situs kami **www.undp.or.id**

Foto sampul:
Penerima manfaat pemulihan mata pencaha rian melaluhi hibah dan pemberdayaan kemampuan bertani di Sirete, mengurus lahan timun dan sayuran.
Foto: Gedsiri Suhartono

SEKAPUR SIRIH

Selamat datang di edisi perdana *newsletter* enam bulanan Unit Pencegahan Krisis dan Pemulihan UNDP Indonesia. *Newsletter* ini, yang bertujuan mengangkat hal ihwal mandat CPRU di bidang pencegahan krisis, pemulihan, dan pembangunan perdamaian di sektor pembangunan, dihasilkan lewat kerja sama yang erat dengan Pemerintah Republik Indonesia. Melalui penerbitan ini, kami ingin mengabarkan peran serta kami dalam pembangunan Indonesia kepada para donor, para pemangku kepentingan dalam bidang pembangunan, pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Lantaran ini merupakan edisi perdana, kami mencoba untuk memberikan pemahaman dasar mengenai cakupan kerja Pencegahan Krisis dan Pemulihan. Untuk menjelaskan bagaimana teori tersebut diejawantahkan menjadi tindak di lapangan, bagian *feature* mengulas kunjungan monitoring lapangan bersama UNDP-Pemerintah Indonesia di Nias yang diselenggarakan pada bulan Oktober yang mengevaluasi sejumlah proyek Pencegahan Krisis dan Pemulihan di pulau tersebut.

Pulau Nias, yang semasa prabencana hampir tidak pernah muncul di 'radar' pembangunan, terkenal karena pemandangan alamnya yang masih asli, pantai berselancarnya yang terpencil, dan lingkungannya yang bernuansa pedesaan.
Namun, seperti halnya berbagai wilayah lain di Indonesia yang terkena bencana selama 5 tahun terakhir ini, tsunami pada tahun 2004 dan gempa bumi dahsyat berkekuatan 8,7 skala Richter tahun 2005 telah meluluhlantakkan pulau tersebut. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan UNDP dalam pemulihan dan rekonstruksi Nias dalam beberapa tahun terakhir ini dengan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Nias yang, setelah sintas dari bencana pada tahun 2004 dan 2005, tengah membangun kembali kehidupan mereka di Pulau Nias.

Pengalaman UNDP di Nias merupakan peringatan yang gamblang bahwasanya, baik saat berurusan dengan krisis yang diakibatkan oleh bencana alam maupun konflik bersenjata, tantangan seputar pemulihan dan pembangunan akan sering ditemui dan dengan demikian akan selalu dibutuhkan solusi-solusi inovatif . Melalui kerja sama yang erat dengan Pemerintah Indonesia di tingkat pusat, provinsi, dan lokal, sembari berkolaborasi dengan berbagai lembaga donor, sesuai mandat pembangunanya, UNDP akan terus aktif dalam komitmennya mendampingi proses pemulihan dan rekonstruksi jangka panjang Indonesia.

Sudah tentu, pekerjaan kami tidak mungkin dapat terlaksana tanpa dukungan dari masyarakat donor. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia dan Pemerintah, UNDP mengandalkan kemurahhatian donor. Kami menyadari bahwasanya terdapat keterkaitan yang erat antara sumber daya yang disediakan untuk menyelenggarakan pekerjaan serta kualitas dari hasil karya kami. Harapan kami adalah bahwa *update* enam-bulanan ini akan memberikan pemahaman yang cukup mengenai pekerjaan kami agar para donor terus mendukung pekerjaan kami.

Kami harap Anda menikmati membaca mengenai pekerjaan kami.

Oliver Lacey-Hall
Kepala Unit Pencegahan Krisis dan Pemulihan UNDP Indonesia

PORTFOLIO Proyek Unit Pencegahan Krisis dan Pemulihan.

Proyek	Periode	Mitra Nasional	Donor	Total Anggaran
Safer Communities through Disaster Risk Reduction (SC-DRR)	2007 - 2010	BAPPENAS, BAKORNAS PB, DEPDAGRI, Pemerintah Daerah, Decentralization Support Facility (DSF)	Department for International Development (DFID).	18,000,000 dollar AS
Early Recovery Assistance (ERA) for Yogyakarta and Central Java	2006 - 2008	BAPPENAS	UNDP Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR), (Crisis Prevention and Recovery Thematic Trust Fund (CPR TTF), Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), Trinidad and Tobago, United Nations International Staregy for Disaster Reduction (UNISDR).	3,377,000 dollar AS
Peace Through Develop-ment (PTD)	2006 - 2010	BAPPENAS	Department for International Development (DFID), Netherlands, New Zealand Aid, Swedish International Development Agency (SIDA).	16,569,645 dollar AS
Strengthening the Capacity of Civil Society Organizations	2006 - 2010	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias	Multi Donor Fund (MDF) for Aceh and Nias.	5,996,500 dollar AS
Emergency Response and Transitional Recovery Programme (ERTR)	2005 - 2007	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias	AEDES, Armacell, Australia, Banamex, Belgium, Canada, Coca Cola, CRF, Desentralisation Support Facilities (DSF), DHL, Germany, Ireland, Japan, South Korea, Multi Donor Funds for Aceh and Nias (MDF), Nepal, Netherland, Nike, Norway, Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), United Nations Funds for International Partnership (UNFIP), United Arab Emirates(UAE), United Kingdom, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), World Food Programme (WFP).	15,200,000 dollar AS
Technical Support for the Agency for Rehabilitation and Reconstruction of Aceh and Nias	2005 - 2007	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias	Multi Donor Fund (MDF) for Aceh and Nias.	127,174,857 dollar AS
Strengthening Sustainable Peace and Development in Aceh (SSPDA)	2005 - 2008	BAPPENAS, Badan Reintegrasi Aceh	Department for International Development (DFID), European Union (EU).	15,200,000 dollar AS

KUNJUNGAN BERSAMA
monitoring lapangan UNDP

Pernahkah Anda bertanya tentang seluk beluk bantuan pembangunan? Proses yang menghubungkan kerangka kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan upaya pengurangan kemiskinan tentu saja rumit, jadi bagaimana UNDP menjangkau masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan pembangunan?

Kunjungan bersama dalam rangka pemantauan ke lapangan yang baru-baru ini di selenggarakan oleh Planning, Monitoring and Evaluation Unit (PMEU) UNDP menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam kaitannya dengan proyek-proyek yang dikembangkan bersama antara UNDP dengan Pemerintah Daerah Nias. Kunjungan Misi Bersama Pemantauan Lapangan yang berlangsung dari tanggal 3 sampai 5 Oktober 2007 itu, bertujuan memberikan mitra UNDP pengalaman langsung untuk mengetahui sifat dan cakupan pendampingan kami di tingkat lapangan, yang mencakup pula kunjungan ke sejumlah proyek *Livelihood Assessment dan Community Grants*. Untuk mendukung pengkajian proyek sebelum selesai, kunjungan dimaksudkan untuk mendengarkan umpan balik dari para penerima manfaat utama guna mendapatkan masukan langsung mengenai dampak berbagai kegiatan UNDP di Nias dan memahami berbagai hikmah pembelajaran serta kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan bantuan pembangunan untuk masyarakat pulau terpencil ini.

Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Departemen Luar Negeri (DEPLU), dan UNDP ikut berpartisipasi dan untuk pertama kalinya memanfaatkan metode baru yang dirancang untuk menilai tingkat kepuasan penerima manfaat. Proses kuantifikasi tingkat keberhasilan proyek tidak sederhana. Namun, UNDP berusaha untuk memberdayakan dan merangkul lebih erat penerima manfaat dan mitra proyek kami dengan secara proaktif mengembangkan *Beneficiaries' Satisfaction Survey*, yang desain generiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing proyek UNDP dan bertujuan untuk mengukur dampak, manfaat dan persepsi tentang relevansi semua proyek dari perspektif penerima manfaat.

"Kami berharap berbagai masukan yang diperoleh dari survei ini akan meningkatkan pemahaman para mitra kami seputar kegiatan UNDP dan bagaimana kegiatan itu dijalankan," jelas Sirman Purba, Programme Officer dari PMEU. "Sejauh ini penekanannya difokuskan pada progress secara (programatis) substansial dan keuangan, tetapi Beneficiaries' Satisfaction Survey diharapkan akan menjadi alat ukur yang penting dalam pekerjaan kami."

Maksud dari kunjungan bersama ke lapangan itu adalah memberikan masukan dan menjawab berbagai pertanyaan yang acap kali muncul dalam Country Programme Action Plan (CPAP) Review UNDP - BAPPENAS, yang diadakan setiap kuartal, yang dirancang untuk mendukung implementasi Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Induk Rekonstruksi Aceh dan Nias. CPAP merinci sasaran-sasaran tahunan yang ingin dicapai setiap tahun serta mengaitkannya untuk mengidentifikasi hasil-hasil dan keluaran-keluaran yang ditetapkan. Dengan demikian, kajian ulang CPAP mengevaluasi progress dan pencapaian setiap proyek sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan sejak dari awal.

> "Kami sangat menghargai perhatian yang diberikan oleh tim di lapangan. Mereka meningkatkan wawasan kami dan mengajari kami ketrampilan. Ini sifatnya berkelanjutan. Berinvestasi dan melatih orang adalah cara terbaik agar ada keberlanjutan."
>
> Yuniati Gea
> *petani asal Ononamolo.*

ATAS - Tim Kunjungan Monitoring Bersama Pemerintah Indonesia-UNDP tiba di Gunung Sitoli, Bandara Nias.

BAWAH - Tim Kunjungan Monitoring Bersama menerima pengarahan dari proyek Nias UNDP sebelum bertolak ke lapangan.

Agung Cahaya Sumirat dari DEPLU yang sudah beberapa kali ikut serta dalam kunjungan bersama untuk monitoring lapangan itu, memuji prakarsa Nias yang ia yakini telah mempererat hubungan antara UNDP dengan pemerintah. "Dalam konteks makro, kunjungan ini juga telah menunjukkan transparansi, kepemilikan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan. Saya sungguh-sungguh berharap prakarsa ini bisa ditiru oleh semua mitra pembangunan Indonesia," tambahnya.

NIAS
di persimpangan jalan

KIRI -"Dalam seminggu, uang hibah bakal habis terpakai, tetapi bantuan di lapangan dan peningkatan kapasitas selama jangka panjang lebih baik bagi kami," ujar Sofulala Zega, seorang petani padi di Ononamolo ketika ditanya jenis bantuan yang ia sukai.

Meskipun memiliki budaya dan adat istiadat yang kuat, Nias adalah salah satu daerah tertinggal di Indonesia dengan sepertiga dari penduduknya yang berjumlah 500.000 jiwa itu hidup di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan kurang dari Rp 20.000 perhari. Nias sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur sebab lokasi Nias yang terpencil dan bermedan tangguh membuat pembangunan dan perawatan sarana kesehatan, sekolah dan jalan lebih sulit.

Berbagai tantangan yang mengendalai penduduk Nias menjadi semakin besar ketika daerah itu diluluhlantakkan oleh dua bencana alam yang terjadi secara beruntun; tsunami pada Desember 2004 dan gempa bumi pada Maret 2005. Karena gempa berkekuatan 8,7 pada skala Richter terjadi pada malam hari, bencana tersebut merenggut banyak korban jiwa dan ibu kota Nias, Gunung Sitoli, juga mengalami kerusakan berat. Infrastruktur Nias juga terkena dampak gempa bumi dan sejumlah besar jalan penting, yang dari semula memang sudah buruk, menjadi tidak bisa dilalui.

Nias langsung muncul di 'radar pembangunan' nasional dan internasional karena kedahsyatan bencana-bencana itu menunjukkan kebutuhan akan pemulihan dan pembangunan jangka panjang pascabencana di pulau itu. Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa bergerak cepat menanggapi krisis itu dan bantuan kemanusiaan langsung dikirim ke Nias untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk Nias melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga pemerintah Indonesia dan lewat kerja sama dengan sejumlah LSM lokal maupun dan internasional. Walaupun UNDP aktif dalam proses pemulihan sedari awal, tugas utamanya adalah menciptakan iklim bagi pembangunan berkelanjutan yang melampaui fase tanggap darurat melalui mitra utamanya, yakni Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, pemerintah daerah Sumatera Utara dan masyarakat setempat. UNDP telah berupaya membantu pemulihan dan rekonstruksi Nias lewat beragam program yang manfaatnya sudah bisa dirasakan di lapangan. Untuk mencapainya, UNDP, dan lembaga mitra senantiasa melibatkan masyarakat Nias agar mendapatkan kepercayaan, restu, dan kerja sama mereka dalam semua bidang. Community Action Plan yang dirancang untuk memaksimalkan dan mengatasi kendala keterbatasan sumber daya dengan cepat dirumuskan dan diimplementasikan. Unsur-unsur penting dari Community Action Plan tersebut antara lain berupa berbagai inisiatif yang mendukung perbaikan dan pembangunan jalan yang rusak dan juga pembangunan sarana pengelolaan sampah dan program pemulihan sumber penghidupan, termasuk berbagai kegiatan peningkatan pendapatan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat pedesaan maupun lembaga pemerintah daerah. BRR diprogram untuk bekerja di Nias selaku pengendali utama pembangunan sampai setidaknya tahun 2009. Meskipun begitu, masih banyak yang masih perlu dilakukan bersama masyarakat Nias yang merasa bangga dengan pulaunya dan kadang kala merasa keberatan dengan pemikiran bahwa mereka adalah "bagian" dari Aceh dalam arti wilayah administratif dan pengiriman bantuan pembangunan. Keprihatinan mengenai hal ini acap kali diutarakan selama kunjungan monitoring dan banyak yang setuju bahwa tanpa upaya yang terpadu dari semua pihak yang terkait (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan donor) proses pemulihan di Nias berpotensi menjadi kendala. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pemerintah daerah Nias meminta agar bantuan UNDP diperpanjang.

"Kami berharap bantuan diperpanjang setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Kami sangat berterima kasih atas pembangunan infrastruktur yang telah diberikan kepada kami sejauh ini walaupun rekonstruksi baru mencapai 50% dari sasaran yang ingin dicapai pada saat kami harus berdiri sendiri lagi," ujar Sekretaris Kabupaten Nias F.G. Zebua.

Oleh karena itu, walaupun masih banyak yang harus dikerjakan, dalam dua tahun sejak Nias menderita akibat dua bencana alam yang terjadi secara beruntun; Nias berkembang dari status keadaan yang luluh-lantak menjadi ekonomi yang sedang pulih yang menjanjikan berkat proyek-proyek pembangunan masyarakat yang telah rampung dan sedang berjalan yang membangkitkan rasa percaya diri masyarakat dan akan mewarisi peluang dan harapan bagi masa depan pulau ini.

Jadi, bagaimana dengan masyarakat Nias sekarang? Berikut adalah pengalaman pribadi sejumlah penerima manfaat dalam proses pemulihan dan pembangunan pascabencana di Nias.

nias YA'AHOWU!!!

ATAS - "Saya menghargai beragamnya proyek yang kami kunjungi di lapangan, karena kami menemukan bahwa banyak pendekatan yang berbeda-beda yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan masayarakat pascabencana alam," ujar Yan P. Pangaribuan dari Bappenas.

BAWAH - Riana Hutahayan dari UNDP (kiri) sedang bersantai di sela-sela jadwal monitoring lapangan yang padat dengan merendam kaki di dalam saluran irigasi di Sirete sembari mewawancarai seorang petani tentang tingkat kepuasan dari program pendampingan sumber penghidupan.

'Ya'ahowu…!!!!!' Kata ini merupakan istilah umum di Nias untuk membuka dan menutup sebuah pertemuan. Yaahowu, yang dapat diartikan sebagai 'salam !!!!!', menjadi akrab di telinga tim monitoring saat mengunjungi masyarakat Nias, yang menyambut hangat para tamu dari Pemerintah dan UNDP. Baik pejabat publik, instansi perencana pembangunan daerah, pedagang di Pasar Pagi pulau Nias yang hiruk-pikuk, maupun petani asal Ononamolo, Sirete dan Binaka semua terkesan puas dengan bantuan yang telah disalurkan oleh Pemerintah dan UNDP selama dua tahun terakhir. Semuanya tercermin dari ucapan terima kasih yang tulus. Mereka adalah penerima manfaat bantuan pembangunan yang mulai menunjukkan hasilnya di Nias. Ada benang merah yang merangkai kesamaan kehidupan mereka pasca bencana yang mereka alami sebelum upaya pemulihan berlangsung di Nias lewat intervensi yang dilakukan secara cepat dan tepat sasaran oleh Pemerintah melalui beragam proyek UNDP.

Tim monitoring mengunjungi berbagai lokasi dan proyek Program Aceh and Nias Emergency Response and Transitional Recovery (ERTR). ERTR dirancang sebagai program yang mendampingi masyarakat yang terimbas tsunami dan gempa bumi di Aceh dan Nias, berikut berbagai upaya-upaya pemulihan sumber penghidupan yang diselenggarakan bertujuan untuk mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat madani (civil society organization – CSO) dan meningkatkan partisipasi akar rumput dalam proses rekonstruksi. Dengan demikian, kegiatan ERTR turut memberikan sumbangsih dalam mengembangkan landasan untuk pertumbuhan masyarakat madani di Nias dengan cara menyalurkan pendampingan peningkatan kapasitas CSO lewat pelatihan dan program pertukaran. Contohnya, produksi pertanian setempat sempat sangat terpukul menyusul bencana alam yang mengguncang Nias. Oleh karena itu, dalam menyalurkan hibah mikro kepada para petani, perhatian khusus diberikan kepada sektor pertanian di Nias dalam kaitannya dengan pembangunan di masa depan.

Sebagian besar hasil pertanian diperdagangkan di Pasar Pagi, yang lokasinya cukup sentral yaitu di samping terminal bus utama di Gunung Sitoli. Terminal bus tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi utama dan pusat niaga di Nias, serta merupakan tempat persinggahan bagi mereka yang bepergian ke dan dari Sumatera Utara untuk membeli perlengkapan dan oleh-oleh. Karena terminal bus dan pasar luluh lantak lantaran gempa bumi, pedagang kecil kekurangan modal untuk memulai kembali usaha mereka sehingga pembeli menjadi jauh berkurang. Untuk merevitalisasi kegiatan usaha para korban gempa, pemerintah melalui UNDP dan mitra LSM setempat telah menyalurkan sejumlah hibah mikro kepada sejumlah koperasi di Nias, sebagian besar diantaranya memiliki anggota perempuan. Oleh koperasi-koperasi itu, dana diputar dengan menggunakan sistem arisan, atau dana bergulir, dimana pelunasan pinjaman oleh seorang anggota akan membuka kesempatan bagi anggota lain untuk menggunakan dana yang tersedia.

KIOS
yang selamat berkat gempa

Aminah Manulang, yang pada 2006 terpilih sebagai kepala perwakilan pedagang Pasar Pagi, telah melunasi pinjaman yang ia dapat dari hibah mikro ERTR. Setelah usahanya luluh lantak diguncang gempa bumi Maret 2005, Aminah menggunakan pinjaman yang dia dapatkan sebesar Rp 3 juta untuk membangun kembali kios sembakonya yang berukuran 2 x 3 meter itu. Bantuan tersebut, yang disalurkan lewat koperasi hibah mikro Yayasan Melati, datang pada saat yang tepat bagi ibu dua anak ini ini.

"Tidak gampang meyakinkan anggota kami bahwa dana yang tersedia jumlahnya terbatas. Dana tersebut harus disalurkan secara merata kepada lebih dari 100 pedagang korban gempa. Yang dapat kami lakukan adalah memberikan teladan dan menyalurkan dana kepada mereka yang paling membutuhkan," tutur Aminah. Menurut Aminah, kiosnya yang "hancur lebur" ternyata merupakan rahmat tersembunyi. "Seandainya kios saya tidak rusak berat, barangkali saya tidak akan memprioritaskan pembangunan kembali usaha saya. Tetapi karena modal untuk memulai kembali usaha sudah tersedia, saya bisa bangkit kembali lebih cepat dari yang semula saya perkirakan," tambahnya.

Sebulan sekali, para anggota koperasi bertemu untuk membahas keuangan dan permohonan pinjaman dari anggota. Pertemuan tersebut sekaligus memantapkan kegiatan ormas Yayasan Melati, yang merupakan mitra UNDP di proyek ERTR. Mereka memberikan pelatihan pembukuan, metode usaha, dan peningkatan kepercayaan dalam rangka memperluas keanggotaan koperasi. "Senang rasanya mendapatkan pendampingan ini. Kami sangat menghargai pembinaan dan perhatian dari mereka yang membantu menjalankan koperasi kami ini," ujar Aminah merujuk pada kunjungan berkala para fasilitator dari Yayasan Melati. "Melalui pemantauan ruin ini, kami belajar dari kesalahan-kesalahan kami, dan telah mendapatkan banyak ketrampilan baru."

Aminah mengakui ia telah banyak belajar dari kegiatan ini, namun posisinya sebagai kepala koperasi cukup menyita waktunya dalam menghidupi keluarga dan membesarkan ketiga anaknya. Oleh karena itu, kini setelah berhasil membangun kembali usahanya, Aminah sedang mempertimbangkan untuk mundur dari posisinya. Aminah ingin memberikan kesempatan kepada anggota lain untuk menguji, dalam bahasa Aminah sendiri, "ketrampilan berorganisasi" yang didapatkannya dari posisi ini. Diharapkan bahwa siapa pun yang akan menjadi penerus Aminah selaku kepala koperasi, akan terus merajut kesuksesan untuk kelompok yang penting dalam masyarakat usaha kecil di Nias ini.

ATAS - "Rasanya senang mendapatkan pendampingan ini. Kami sangat menghargai pembinaan dan perhatian dari mereka yang membantu menjalankan koperasi kami ini," ujar Aminah Manulang (kiri), memuji kunjungan berkala dan saran dari fasilitator dari Yayasan Melati.

> "Hibah mikro memungkinkan saya menabung untuk pendidikan anak, karena pendapatan dari bengkel motor saya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi sekarang saya menjadi pelatih untuk murid-murid SMA."
>
> Yance Mendrova
> *Penerima bantuan dana berputar*

WARUNG mak andi

Sejak 2001, Nuriatun Zebua menghidupi keluarganya dengan menjual makanan siap saji dekat rumahnya di Gunung Sitoli Tengah, namun gempa bumi pada 2005 meluluhlantakkan rumah dan usahanya. Karena tidak ada yang bisa diandalkan lagi, Nuriatun mesti mencukupi kebutuhan dengan pendapatan tidak tetap dari suaminya yang bekerja sebagai buruh kasar. Nuriatun kebetulan aktif di Yayasan Al-Irsyad, salah satu LSM yang ditunjuk untuk menyalurkan hibah mikro UNDP kepada penerima manfaat, dan dari sana ia mendengar tentang kemungkinan memperoleh pinjaman dari UNDP, dan setelah menjalani "uji kelayakan", oleh anggota Al-Irsyad sendiri, Nuriatun pun mendapatkan pinjaman sebesar Rp 5 juta tahun 2005. Dengan perputaran modal Rp 600.000 sehari, ibu tiga anak ini sudah lama melunasi utangnya dan usahanya cukup untuk menghidupi keluarganya dan, yang sangat ia banggakan, menyekolahkan ketiga anaknya. Kafetaria yang bernama Mak Andi itu berlokasi di perkantoran Unicef Nias dan banyak dipuji karena masakannya yang berkualitas tinggi dan segar. "Tanpa bantuan modal ini, jangankan menabung untuk mempercantik warung, bisa kembali mempunyai usaha sendiri saja saya tidak berani berharap," ujar Nuriatun.

PROGRAM
pemulihan sumber penghidupan pertanian

Proyek ERTR memfokuskan kegiatannya pada peningkatan produktivitas pertanian masyarakat tani kecil di Nias yang mengalami kerusakan fisik dan kendala ekonomi menyusul kedua gempa bumi.

Selain mendapat pembekalan ketrampilan seputar cara-cara yang lebih baik dalam bertani padi, sebuah klaster yang terdiri dari 136 petani di Ononamolo dan Sirete juga mendapatkan bantuan dalam bentuk benih, pupuk, peralatan pertanian, dan infrastruktur irigasi yang lebih baik. Kepada kami, para petani bercerita bahwa diskusi-diskusi mingguan yang dinamis yang diselenggarakan setelah gempa bumi pada tahun 2004 dan 2005 membangkitkan kembali minat serta harapan mereka untuk memperbaiki praktik-praktik bertani yang lama. Sebelum proyek ini dimulai, petani setempat memanen cukup dua kali setahun, tetapi dengan wawasan yang telah diperluas dan dengan dorongan semangat dihasilkan kualitas tanaman yang lebih baik dengan masa matang yang lebih singkat yang bisa dipanen sekali tiga bulan.

"Sebelum program ini, kami tidak tahu kalau ada cara menanam, berencana, dan panen yang lebih baik, tetapi kami menjadi tahu soal cara bertani yang lebih baik. Program ini telah mendorong dan memotivasi kami untuk tidak menyerah dan mencari solusi dan mencapai prestasi yang lebih baik," ujar Yuniati Gea, seorang petani padi asal Ononamolo.

Ada sejumlah petani yang bahkan melaporkan peningkatan hasil panen hingga empat kali lipat, yang, sungguh luar biasa, bahkan jauh di atas rata-rata nasional sebesar 4,7 ton per hektar. Sayangnya, data ini tidak bisa diklarifikasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pemerintah daerah Nias dengan bangga me ngumumkan bahwa pulau itu mestinya mencapai swasembada beras pada 2011.

TIPS

REMPAH-REMPAH
menghalau hama tanaman

Mengacu pada pengetahuan tradisional, pengamatan saat masa kanak-kanak, serta ingin tahu, Khairullah dari Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala (Unsyiah) in Banda Aceh, meracik berbagai ramuan untuk menghalau hama di lahan-lahan pertanian di Nias. Ramuan yang sudah pernah diuji dan terbukti berhasil merupakan solusi yang jauh lebih murah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan ketimbang pestisida komersial.

Berikut beberapa temuan Khairullah:

1. Irisan pinang untuk menangani keong emas.
2. Bawang merah yang ditumbuk dan disaring serta sari bawang putih untuk mengusir serangga.
3. Tumbukan daun palem untuk mengusir cacing dan tikus.
4. Abu kayu untuk mengusir burung pemakan beras.

KEGIATAN PENCEGAHAN Krisis dan Pemulihan di Nias

Lokasi	Jenis Proyek	Kegiatan	Penerima manfaat
nias	Sumber Penghidupan	Hibah Mikro dan Pembangunan Saluran Irigasi Tersier.	6,282
	Tata Pemerintahan	Pendampingan kepada pemerintah daerah.	Pemerintah daerah Nias
	Program Pemulihan Pengelolaan Sampah Tsunami (Tsunami Recovery Waste Management Programme - TRWMP)	Pembongkaran bangunan yang rusak karena gempa, peningkatan kapasitas instansi kebersihan lingkungan daerah, penggalakan kebersihan lingkungan, tempat pembuatan kompos, tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA).	Warga Gunung Sitoli dan Iahewa
	TRWMP – sumber penghidupan pengelolaan sampah	Mendaur ulang jerami padi menjadi bahan pembersih dan botol plastik sebagai kemasan bibit dan polly bag.	Data sedang dievaluasi
	Organisasi Masyarakat Madani	Penyaluran hibah mikro kepada organisasi masyarakat madani.	4,000
	Perumahan	Pembangunan perumahan.	110
nias selatan	Sumber Penghidupan	Hibah mikro, revitalisasi keuangan mikro dan koperasi, pegadaan kapal nelayan.	975
	Tata Pemerintahan	Pendampingan kepada pemerintah daerah.	Pemerintah Daerah Nias Selatan
	Program Pemulihan Pengelolaan Sampah Tsunami (Tsunami Recovery Waste Management Programme - TRWMP)	Peningkatan kapasitas instansi kebersihan lingkungan daerah, penggalakan kebersihan lingkungan, tempat pembuatan kompos, TPS dan TPA.	Warga Teluk Dalam
	Organisasi Masyarakat Madani	Penyaluran hibah mikro kepada organisasi masyarakat madani.	5,000

Biro Pencegahan Krisis dan Pemulihan (Bureau of Crisis Prevention and Recovery)

BCPR-UNDP

Secara global, UNDP memiliki sejarah panjang dalam mendampingi berbagai upaya peningkatan kapasitas ketika dihadapkan dengan bencana alam dan bencana karena perbuatan manusia. Dengan berbagi pengetahuan, mengembangkan ketrampilan lokal, dan meningkatkan kapasitas nasional, UNDP telah memberdayakan masyarakat di berbagai penjuru dunia agar dapat lebih baik membantu diri mereka saat terjadi bencana. Berhubung keahlian UNDP adalah menyalurkan pendampingan bagi upaya pemulihan awal dan tanggap darurat, mandat utama UNDP adalah membina hubungan yang efektif antara tanggap darurat dengan bencana dan upaya pemulihan awal hinggga jangka menengah. Karena ini, peranan UNDP merupakan bagian dari proses reformasi kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tengah berlangsung dan bertujuan memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan pemulihan awal secara lebih efektif lewat koordinasi dan penyerahan bantuan yang lebih efektif.

Unit Pencegahan Krisis dan Pemulihan (Crisis Prevention and Recovery Unit - CPRU)

UNDP INDONESIA

Karena proyeknya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, UNDP memiliki tujuh kantor lapangan untuk menyokong berbagai kegiatan pencegahan krisis and pemulihan di daerah Banda Aceh, Nias, Yogyakarta, Ambon, Palu, dan Ternate. Kantor di Banda Aceh dan Nias merupakan pusat operasional untuk kegiatan ERTR Aceh, kantor di Yogyakarta menjadi kantor pusat ERA, sementara kantor di Ambon, Palu, dan Ternate mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Program Perdamaian Melalui Pembangunan (*Peace Through Development* - PTD). Selain itu, masih ada 45 staf yang berkantor di Kantor Pusat UNDP Indonesia di Jakarta menyokong amanat ruang lingkup kerja CPRU.

Kegiatan Penanganan Bencana (Disaster Management) membidangi kegiatan UNDP yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana alam dan pemulihan pascabencana. Portofolio proyek yang tengah dilaksanakan termasuk Program Emergency Response and Transitional Recovery (ERTR) untuk Aceh dan Nias, Program Early Recovery Assistance (ERA) di Yogyakarta, serta Program Support to Indonesia's Civil Society Organizations (CSO), dan prakarsa tingkat nasional bertajuk Safer Communities through Disaster Risk Reduction (SC-DRR).

Kegiatan UNDP yang terkait dengan pencegahan konflik, kohesi sosial, rekonsiliasi masyarakat dan pembinaan perdamaian mencakup portofolio program seperti Mendukung Perdamaian dan Pembangunan yang Berkelanjutan di Aceh (*Strengthening to Sustainable Peace and Development in Aceh* - SSPDA) serta Program Pembangunan Melalui Perdamaian (*Peace through Development* - PTD) yang diselenggarakan di provinsi di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.

Dengan fokus untuk menghubungkan para pelaku utama pembangunan pada informasi, pengalaman, dan tenaga ahli lewat networking, transfer pengetahuan dan kegiatan terkait lainnya, Tim Pencegahan Krisis dan Pemulihan UNDP juga memastikan bahwa hasil pembelajaran yang dipetik dari kegiatan UNDP tersedia untuk referensi pemangku kepentingan pembangunan terutama pemerintah dan mitra pembangunan UNDP. Bekerja secara proaktif untuk berbagi pengetahuan, secara berkala tim kami juga menyelenggarakan studi dan lokakarya untuk meningkatkan kapasitas lokal dan memfasilitasi studi-studi hikmah pembelajaran untuk kemaslahatan pihak-pihak yang bergiat di sektor pembangunan.

Tim Pencegahan Krisis dan Pemulihan juga memiliki seksi khusus yang mendukung pelaksanaan semua kegiatan dari awal sampai akhir. Tim kami memastikan bahwa kegiatan penyaluran bantuan dilaksanakan sesuai dengan metodologi programatis UNDP, dan memenuhi semua kewajiban kepada donor, mitra pelaksana dan Pemerintah. Dukungan komprehensif termasuk bimbingan dalam merumuskan data dasar dan keluaran proyek yang dapat diukur, pemantauan dan evaluasi tahapan pencapaian dan sasaran proyek serta memastikan bahwa laporan, audit, komunikasi, keuangan, dan syarat pengarusutamaan pendekatan berbasis gender dan hak asasi manusia di UNDP dipenuhi dalam semua kegiatan Pemulihan Krisis dan Pencegahan.

ATAS -"UNDP menggalakkan kapasitas Nias di bidang pertanian dan ekonomi. Dulu, setiap tahun, Nias harus mengimpor sekitar 46 ribu ton beras, tetapi tahun lalu kami mengimpor hanya 30 ribu ton, dan sekarang kami berusaha mencapai swasembada beras pada 2011. Peningkatan kapasitas dan pelatihan yang diberikan telah mendorong banyak eks petani untuk bekerja kembali di sektor pertanian," ujar Wakil Bupati Nias Temazaro Hareva (kiri) saat menyerahkan kenang-kenangan kepada perwakilan UNDP, Jason Proynk.

BAWAH - "Berjumpa langsung dengan masyarakat, terutama penerima manfaat sasaran, membuat kami makin menghargai pekerjaan dan bantuan UNDP di lapangan," ujar Tuti Wahyuningsih dari DEPLU.

LIMA IKHTIAR
UNDP

Proyek-proyek UNDP berkaitan langsung dengan agenda pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2010, yaitu: "Menciptakan Indonesia yang aman dan damai." Dengan dana lebih dari 140 juta dollar AS yang dijanjikan oleh berbagai pemerintah, lembaga pembangunan, dan lembaga swasta kepada UNDP, bahu-membahu dengan Pemerintah Indonesia dan masyarakat pada berbagai tataran dalam rangka mencegah dan menyelesaikan krisis dengan cara memutuskan siklus kerentanan dan mengurangi dampak-dampak yang merugikan.

Dalam praktiknya, UNDP menggunakan lima ikhtiar untuk mencapai mandatnya dengan memastikan bahwa pencegahan krisis dan mitigasi bencana menjadi hal pokok dalam strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan:

Advokasi dan peningkatan kesadaran.

Dengan berpartisipasi dalam forum-forum kebijakan di tataran nasional, kawasan dan internasional serta dengan menyelenggarakan advokasi dan peningkatan kesadaran secara kontinyu, CPRU menggalakkan peningkatan pemahaman dari pelbagai persoalan seputar pencegahan krisis dan pemulihan di Indonesia. Hal ini memungkinkan UNDP tetap berada di '*cutting-edge*' informasi sehingga bisa mendiseminasi masukan yang berharga dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan, penerima manfaat, dan para mitra dari Pemerintah Indonesia sebelum mengembangkan program-program pencegahan konflik dan pengurangan risiko bencana alam. Salah satu prakarsa UNDP adalah mendukung percepatan proses pembahasan dan pengadopsian Undang-Undang Penanganan Bencana serta kampanye peningkatan kesadaran yang tengah berjalan.

Pengembangan kapasitas.

'Kapasitas' dapat diartikan sebagai kemampuan perorangan, organisasi, dan masyarakat untuk menyelenggarakan fungsi, menyelesaikan permasalahan dan mencapai sasaran. Pengembangan kapasitas merupakan tugas korporat UNDP global. Bersama pemerintah dan lembaga mitra, kemampuan masyarakat di bidang pengurangan risiko bencana alam dan penanganan krisis sudah mulai dapat dirasakan manfaatnya. UNDP juga telah menggelar landasan-landasan kelembagaan yang kokoh untuk pemulihan kembali dari bencana. Semua program kerjasama UNDP menekankan pengembangan kapasitas kepada penerima manfaat sasaran, misalnya pengadopsian proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) oleh pemerintah daerah di tiga provinsi sasaran yaitu Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Sejumlah masyarakat yang terimbas bencana juga telah memetik manfaat dari kegiatan pemulihan sumber penghidupan yang tepat sasaran, yang telah menciptakan interaksi dan konsensus di dalam masyarakat yang sebelumnya mengalami pergolakan atau bencana.

Penggalangan konsensus dan dialog dengan penekanan pada pembangunan yang peka konflik dan risiko.

Berdasarkan penggalangan konsensus, dialog, serta mendukung pendekatan-pendekatan yang berbasis masyarakat dalam pembangunan, UNDP menyelenggarakan proses-proses inklusif yang bertujuan membangun kepercayaan antarpihak yang bertikai sehingga tercipta partisipasi dan konsensus yang lebih luas dalam pembangunan daerah. UNDP, misalnya, telah membantu memfasilitasi proses reintegrasi pengungsi internal atau eks kombatan serta keluarga mereka untuk kembali menyatu dengan masyarakat bukan hanya dengan menekankan penerima manfaat primer, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan serupa dari masyarakat penampung. *Program Strengthening Sustainable Peace and Development in Aceh* (SSPDA) dirancang untuk menjawab kebutuhan dan harapan dari masyarakat penerima manfaat agar dapat menjadi landasan yang lebih kokoh untuk kohesi sosial, pembangunan ekonomi, rekonsiliasi, dan pembangunan perdamaian yang lebih mantap yang mengarah ke pemulihan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dukungan atas pendekatan-pendekatan berbasis masyarakat dalam pembangunan.

ATAS - Ade Kuswoyo (depan) dari Bappenas dan Lukas Adhyakso (di belakang) dari UNDP menginspeksi penggiling padi yang disalurkan oleh UNDP Agriculture Support Project untuk mendampingi petani di Sirete.

Lantaran mempunyai sejumlah metodologi dan perangkat analisis risiko, UNDP juga menyelenggarakan kegiatan perencanaan strategis dan pemrograman peka risiko yang bersifat '*tailor-made*' untuk semua pemangku kepentingan kami. Dua contoh adalah Program *North Maluku/ Maluku Recovery* yang baru selesai dan Program *Peace Through Development* (PTD) yang tengah berjalan. Keduanya memantapkan strategi pembangunan mereka dengan perencanaan peka konflik yang terpadu untuk membantu mengurangi risiko bencana alam atau konflik akibat keluaran program.

Jejaring pengetahuan dan praktik teladan.

UNDP telah memberikan pendampingan teknis yang tidak sedikit dalam pengembangan peraturan tambahan UU Penanganan Bencana bersama-sama dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) di tingkat daerah lewat studi seperti survei pengungsi internal dan juga Aceh Peace Development Database dalam rangka mendukung upaya perdamaian dan rehabilitasi yang lestari. Kegiatan tersebut memetakan lokasi penyandang cacat akibat konflik sehingga Pemerintah Indonesia - UNDP berikut para mitranya dapat secara tepat mensasar bantuan pembangunan untuk jangka menengah. Basis data dari Aceh mendukung upaya pembangunan perdamaian dengan menetapkan tren konflik, pemicu utama konflik, dan potensial pembangunan untuk perdamaian di Aceh berdasarkan suatu analisis komprehensif atas konflik kekerasan dan non-kekerasan serta kejahatan terorganisasi.

BIDANG KERJA
UNDP

Pascabencana alam atau pascakonflik bersenjata, UNDP membantu pemerintah pusat dan masyarakat menggelar landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kami berupaya untuk berkarya dalam penanganan krisis, program-program pengurangan risiko bencana dan pemulihan di Indonesia mengacu pada strategi-strategi berikut:

Penanganan Bencana.
CPRU bergiat di tingkat daerah, pusat, regional dan global dalam membangun kapasitas dalam menilai risiko bencana alam dan mengembangkan rencana serta program pengurangan risiko yang tepat. UNDP sudah lama mendukung negara-negara yang rawan bencana dalam merumuskan kerangka legislasi, sistem operasional dan mekanisme koordinasi sehingga terjadi pemaduan pengurangan risiko ke dalam pembangunan manusia. Dilaksanakan secara bersama-sama dengan Pemerintah Indonesia, Program *Safer Communities through Disaster Risk Reduction* (SC-DRR) mendorong sikap transisi dari res-pons bencana menuju pendekatan pengurangan risiko bencana yang komprehensif dan terdesentralisasi yang bersifat berkelanjutan dan terpadu ke dalam fungsi-fungsi inti pemerintahan di semua tataran serta antara semua pemangku kepentingan dan organisasi mitra.

Pemulihan.
Di Indonesia, fokus UNDP adalah pada pemulihan awal, pemulihan ekonomi, pemulihan dari bencana alam serta pengembangan kohesi sosial dan rekonsiliasi.

Pemulihan awal terfokus pada pemulihan kapasitas lembaga-lembaga nasional dan masyarakat segera setelah terjadinya krisis dan menjadi bagian dari respons kemanusiaan PBB atas bencana alam atau konflik bersenjata. Dipandu oleh asas-asas pembangunan UNDP, tahapan-tahapan pemulihan awal bertujuan menciptakan serangkaian proses yang mandiri, dengan kepemilikan nasional untuk menstabilisasi keamanan manusia dan menangani risiko-risiko krisis. Satu contoh dari kegiatan kami di bidang ini adalah Program *Early Recovery Assistance* (ERA) yang merupakan respons terhadap gempa bumi 2006 di provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Karena bencana alam dan konflik merusak rumah, usaha, pasar, dan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang lebar, marginalisasi kelompok atau daerah serta persaingan atas sumber daya alam dapat terjadi dan berpotensi menjadi katalis konflik tambahan. Pascakonflik Ambon, CPRU menyelenggarakan kegiatan peningkatan pendapatan di daerah tersebut yang mencakup partisipasi kelompok lintas masyarakat dalam pengelolaan sampah, daur ulang, dan produksi sagu sebagai ikhtiar untuk secara sukses menggalakkan kerja sama ekonomi di antara semua unsur masyarakat.

Menyusul bencana alam, UNDP biasanya segera mengadakan penilaian kerusakan yang rinci sebelum merumuskan program-program strategis untuk menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan dengan memadukan langkah-langkah pengurangan risiko. Program *Emergency Response and Transitional Recovery* (ERTR) yang dilaksanakan di Nanggroe Aceh Darussalam sejak Januari 2005, beroperasi dalam waktu singkat dan sampai sekarang masih menjadi tiang utama yang menghubungkan upaya pemulihan jangka pendek untuk kegiatan pembangunan jangka panjang daerah.

Kondisi pemulihan pascakrisis kerapkali mengakibatkan kerusakan yang besar dalam jalinan tenun masyarakat menyusul bencana alam atau konflik bersenjata. UNDP lantas menggalakkan perlunya kohesi sosial dan rekonsiliasi lewat prakarsa-prakarsa seperti Program Strengthening Sustainable Peace and Development in Aceh (SSPDA) yang telah memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi sekitar 3.000 eks kombatan dan tahanan politik kembali ke dalam masyarakat Aceh yang sebelumnya terpisah-pisah.

Pencegahan konflik.
UNDP membantu menjawab sebab-sebab struktural konflik kekerasan lewat program pembangunan yang menggalakkan

ATAS - Menjelang sore, dan lelah setelah sepanjang hari membawa dokumentasi dan peralatan yang berat ke tapak-tapak proyek di lokasi terpencil, seorang anggota tim memanfaatkan transportasi lokal untuk mengistirahatkan kakinya.

penyelesaian sengketa, dialog yang aktif, dan partisipasi penuh dari semua aktor dengan menjunjung kesetaraan gender. Program *Peace Through Development* (PTD) UNDP, yang dimulai pada 2005, telah memberdayakan pemangku kepentingan lokal lewat tiga wilayah di Maluku yang sebelumnya merupakan daerah konflik untuk merekonsilisiasi perbedaan yang ada dengan mengemban peranan yang lebih kuat dalam proses perencanaan pembangunan lokal mereka.

Di Indonesia, UNDP memfokuskan pada pemulihan awal, pemulihan ekonomi, pemulihan dari bencana alam serta pengembangan kohesi sosial dan rekonsiliasi.

***